Bahan Bacaan











Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)

Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Basis Data Terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.





Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) - Simpanan Keluarga Sejahtera

Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemengang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp. 200.000/Keluarga/Bulan. Untuk tahun 2014, dibayarkan sekaligus Rp. 400.000 untuk bulan November dan Desember.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya.

Saat ini, 1 Juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian SIM Card, sedangkan 14,5 Juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos.



Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

- Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016.
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemdikbud dan Kemenag.
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial
- Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah).
- Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.

^{*}E-warong: agen bank, pedagang yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian beras dan atau telur

Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.

KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi.

KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial.

Penyelenggara Program adalah BPJS Kesehatan.

Perlu ditekankan bahwa layanan kesehatan bagi pasien pemegang kartu lain yang dikeluarkan BPJS berlangsung seperti biasa dengan manfaat yang sama dengan pemegang Kartu Indonesia Sehat. Penggantian Kartu BPJS menjadi Kartu Indonesia Sehat akan berlangsung bertahap.

Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini



Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia Saat Ini



Kelompok usia dalam siklus hidup

PKH (Program Keluarga Harapan)

INDEKS BANTUAN SOSIAL PKH TAHUN 2019

BANTUAN TETAP SETIAP KELUARGA;

DIBERIKAN

1. REGULER : Rp. 550.000,- / KELUARGA / TAHUN >

HANYA PADA

2. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / KELUARGA/TAHUN

TAHAP PERTAMA

BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA

1. IBU HAMIL : Rp. 2.400.000,2. ANAK USIA DINI : Rp. 2.400.000,3. SD : Rp. 900.000,4. SMP : Rp. 1.500.000,5. SMA : Rp. 2.000.000,6. DISABILITAS BERAT : Rp. 2.400.000,7. LANJUT USIA : Rp. 2.400.000,-

MAKSIMAL 4 ORANG

DALAM SATU KELUARGA

RPJMD2019-2023 | Gubernur Terpilih Rancangan



RPJN D 2019-2023 | Gubernur Terpilih Rancangan

BHAKTI 1: JATIM SEJAHTERA

"Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"

- PKH Plus untuk penduduk miskin 38 kab/kota, 664 kec, 5674 desa dan 2827 kelurahan. Disabilitas, lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan;
- Program KERJA KAMIL (Kesejahteraan Keluarga Jawa Timur Khofifah-Emil) untuk mengentaskan kemiskinan di level provinsi yang terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan daerah dan pusat;
- Mengurangi beban 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan subsidi provinsi anggaran ini akan meningkat mengikuti peningkatan pendapatan APBD provinsi;
- · Perlindungan nelayan kecil melalui BAZ Provinsi Jatim.

30

NAWA SHAKITISATIYA | KERJA BERSAMA UNTUK JATIM SEJAHTERA

VARIABEL DAN DATA YANG DIKUMPULKAN PADA BDT

Identitas RT

- Nama Kepala RT
- Alamat/SIS
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- · Provins
- · Jumlah Anggota RT

Kepesertaan Program

- PKH
- Rastra
- Jamkesmas/PBI
- · Asuransi kesehatan lain
- Jamsostek
- KKS
- KII
- BPJS Mandiri/KIS
- KUR

Demografi

- Nama anggota RT
- Hubungan dengan kepala RT
- Jenis kelamin
- Umur
- Status perkawinan
- Kepemilikan karti ID
- No. Induk Kependudukan (NIK)
- Kartu Keluarga (KK)
- · Akta/Buku nikah

Kesehatan

- · Jenis cacat
- · Penyakit kronis menahun
- · Status kehamilan wanita

Ketenagakerjaan

- · Status bekerja
- Lapangan Usaha
- Jumlah Jam Kerja
- Status pekerjaan
- · Status ART Usaha

Kepemilikan Aset

- Mobil
- Sepeda Motor
- Perahu
- Perahu Tempel
- Perahu Motor
- Kapal
- Sepeda
- Lemaries
- · Tabung gas
- AC
- Pemanas
- Luas ATB
- · Rumah Lain
- · Penguasaan lahan
- Kepemilikan ternak
- Emas
- H
- TV

Perumahan

- Status penguasaan bangunan tempat tinggal
- · Status Lahan
- Luas lantai
- · Luas bangunan
- Jenis lantai
- Jenis dinding
- Jenis aman Jenis atap
- Sumber air minum
- · Cara memperoleh air minum
- Sumber penerangan
- Kelas daya listrik terpasang
- Nomor PLN
- Bahan bakar memasak
- Tempat pembuangan air besar
- Kloset
- Fasilitas Buang Tinja
- Kamar tidur

Pendidikan

- Partisipasi sekolah
- Kelas Tertinggi
- Ijazah tertinggi

8 Kelompok Variabel **71 Indikator**

PEMBAGIAN KLASTER PRONANGKIS

Perpres No.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010

KLASTER I

Bantuan & Perlindungan Sosial berbasis Keluarga



Mengurangi beban masyarakat miskin KLASTER II

Pemberdayaan Masyarakat



Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin KLASTER III

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil



Meningkatkan tabungan dan menajamin keberlanjutan berusaha Keppres No.10/2011

KLASTER IV

Program Murah untuk Rakyat



Memberikan "sesuatu" dengan harga murah, sebagian dibantu Pemerintah

PERAN SLRT-PUSKESOS (Kel-Kec-Kota-Prov-Pusat)

Pusat

- Mempersiapkan desain umum, pedum, juknis SLRT
- Menyediakan sarana dan prasarana dan membangun sistem aplikasi
- Mensosialisasikan SLRT kepada pemprov dan pemda kab/kota
- Memberikan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan SLRT
- Memfasilitasi proses pembelajaran antar daerah
- Memonitor dan mengevaluasi implementasi SLRT
- Mengelola, memutakhirkan BDT dan memberikan bantuan teknis kepada daerah dalam pengelolaan BDT daerah
- Memfasilitasi kerangka regulasi dan kelembagaan SLRT
- Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat di bawah kewenangan Pusat atas rujukan Manajer SLRT
- Menyusun rencana perluasan dan keberlanjutan SLRT
- Memanfaatkan data SLRT untuk perencanaan-penganggaran

3 Kabupaten/Kota

- · Bertindak sebagai Sekretariat Teknis SLRT
- Kontribusi natura & anggaran untuk pelaksanaan SLRT
- · Meng-input data kabupaten/kota
- Melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat
- Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masy di bawah kewenangan Pemda lewat SKPD
- Memanfaatkan data SLRT untuk perencanaan-penganggaran
- Membangun kemitraan dg Lembaga Non-Pemerintah sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di daerah

2 Provinsi

- Membantu sosialisasi, peningkatan kapasitas, proses pembelajaran, dan pemantauan pelaksanaan SLRT di kab/kota
- Kontribusi natura dan anggaran
- Merespon dan menindaklanjuti rujukan dari SLRT terkait program provinsi
- Memanfaatkan data SLRT untuk perencanaanpenganggaran

Desa/Kelurahan

- Bertindak sebagai Sekretariat Puskessos
- Kontribusi natura & anggaran untuk pelaksanaan Puskessos
- Melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat
- Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat dibawah kewenangan Desa/Kel lewat lembaga Teknis Desa
- Memanfaatkan data Puskessos untuk prog. desa dan perencanaan-penganggaran
- Membangun kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerin tah sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di daerah

4 Kecamatan

- Membantu sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar desa/kel dan monitoring Puskessos
- Mendukung tugas tugas supervisor SLRT dalam pelaksanaan SLRT termasuk Rakor Kecamatan penyelenggara SLRT & Puskessos

DATA GAKIN KELURAHAN PURWANTORO 2018

No.	Program	Jumlah
1	PKH (Program Keluarga Harapan)	214 KK
2	KKS/BPNT	371 KK
3	RASDA	200 KK
4	KIP	525 Siswa
5	KIS	449 Orang
6	BPID	350 Orang
7	Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Sejahtera) – Feminisme Kemiskinan	32 KK
8	Baznas Kota Malang	24 Orang
9	Usulan Rehab Rumah Layak Huni	14 Rumah
	DATA BDT BPS 2018	1.063 Orang